



# Buletin Parlementaria

Nomor 1210/1/VIII/2022 • Agustus 2022

## P20 Momentum Diplomasi Politik Luar Negeri Parlemen Indonesia untuk Kepentingan Nasional



3 Puan Maharani  
Ajak Masyarakat  
Dukung Tim  
Indonesia di  
Asean Para  
Games XI



5 Rachmat Gobel  
Apresiasi IPHI  
Luncurkan  
Terobosan Produk  
Inovatif Berbahan  
Singkong 'Mie Haji'



9 772614 339005



Media  
DPR RI

# P20 Momentum Diplomasi Politik Luar Negeri Parlemen Indonesia untuk Kepentingan Nasional

**K**etua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan *Parliamentary Speakers summit at G20* atau P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Parlemen Indonesia dalam kerangka untuk kepentingan nasional. Sehingga, dengan Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20 yang puncaknya diselenggarakan pada November 2022, DPR RI sebagai lembaga legislatif, juga menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan P20 yang akan diselenggarakan pada Oktober 2022 mendatang.

Hal itu disampaikan Fadli saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen bertema 'Urgensi SDGs dan Momentum *Parliamentary Speakers Summit P20 Indonesia 2022* dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya', di Kantor Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/7). "Jadi, pimpinan seluruh parlemen dari negara G20 tersebut akan hadir di Jakarta. DPR RI juga aktif di beberapa organisasi internasional lain yang intinya adalah untuk kepentingan nasional. Jadi, hakikat dari politik luar negeri kita adalah untuk kepentingan nasional," tegas Fadli.

Diketahui, momentum P20 akan mengusung tema "*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*", dengan mengangkat empat isu prioritas. Yaitu, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bertukar cenderamata dengan Sekda Kabupaten Tasikmalaya.

hijau, ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat, parlemen efektif dan demokrasi yang kuat, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. "Keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan pasca pandemi, dan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan global yang muncul dewasa ini," tambah Fadli.

Politisi Partai Gerindra tersebut berharap P20 maupun G20 menjadi momen tepat untuk menampilkan dan mengetalasekan segala potensi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri, meningkatkan investasi ke berbagai sektor prioritas Indonesia, mentransfer teknologi, dan meningkatkan penjualan produk UMKM. Sehingga, perhelatan P20 dan G20 merupakan kesempatan yang baik untuk membangkitkan dan

mempromosikan sektor pariwisata, termasuk kekayaan seni budaya dan kearifan lokal lainnya termasuk kuliner nusantara kepada seluruh anggota G20.

"Keketuaan Indonesia di G20 harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945," tegas Fadli. P20 memiliki tujuan di antaranya meningkatkan dimensi parlementer untuk mendukung agenda global, mendorong interaksi dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen dalam implementasi hasil-hasil pertemuan G20. Kemudian, memperkuat interaksi antara Ketua Parlemen negara-negara G20 dan mitra, serta kerja sama dengan PBB dan organisasi internasional lainnya. ● rdn/sf



# Puan Maharani Ajak Masyarakat Dukung Tim Indonesia di Asean Para Games XI

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak masyarakat untuk mendukung tim Indonesia di

Asean Para Games XI. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah di perhelatan pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara bagi para atlet berkebutuhan khusus itu.

"Mari kita sama-sama mendukung para atlet dan official Asean Para Games XI untuk berlaga dalam kejuaraan tersebut," kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima **Parlementaria**, Selasa (26/7). Asean Para Games XI akan dimulai pada 30 Juli mendatang di mana *torch relay* atau pawai obor telah digelar pada Minggu (24/7) kemarin yang merupakan acara penyambutan tim kontingen dari negara-negara Asia Tenggara.

Puan berharap 324 atlet Indonesia yang berlaga di perhelatan akbar itu mampu memberikan penampilan terbaik dan mengukir prestasi bagi Tanah Air. "Prestasi dari atlet-atlet Para Games akan memajukan dunia olahraga di Indonesia," ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Asean Para Games XI akan mempertandingkan 14 cabang olahraga yang akan digelar di 14 venue di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Semarang. Kegiatan olahraga tersebut diikuti oleh



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

sekitar 2.309 peserta yang terdiri atas 1.648 atlet dan 661 official dari 11 negara di Kawasan Asia Tenggara.

"Dengan dukungan dari masyarakat, kita berharap kontingen Indonesia dapat menjadi juara umum dalam Asean Para Games kali ini. Apalagi, kontingen Indonesia memiliki sejumlah atlet yang berpengalaman bertanding di Paralympic. Peluang Indonesia untuk berprestasi sangat besar dalam ajang ini karena potensi atlet Para Games kita sangat mumpuni," imbuh Puan. • **aha**



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destiantiti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Adhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

# Terima Audiensi PPTII dan ABPEDNAS, Sufmi Dasco Minta Komisi Terkait Tindaklanjuti Persoalan



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan PPTII dan ABPEDNAS.

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari kelompok-kelompok masyarakat di di ruang rapat pimpinan, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (25/7). Dua di antara kelompok masyarakat yang diterima audiensi tersebut adalah dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia (PPTII), Pendidikan Tenaga Kesehatan Tradisional dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan

dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Saat menerima aspirasi dari PPTII dan pihak terkait lainnya, Dasco berkomitmen akan meneruskannya ke komisi terkait, yaitu Komisi IX DPR RI. "Mereka menyampaikan soal pelayanan kesehatan tradisional yang ini memang tidak mudah, mulai dari permasalahan seperti tenaga kerja yang tidak tertampung, regulasi dan lain-lainnya," ujar Dasco.

Karena itu, Pimpinan DPR RI segera merespons dan menyampaikan langsung ke

Pimpinan komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PPTII beserta *stakeholder*, agar lebih detail menerima aspirasi dalam mengatur, menampung, regulasi, dan evaluasi ke Kementerian Kesehatan, agar kesehatan tradisional lebih tertata dengan baik, lebih maju dan nakes tradisional juga dapat terserap dengan baik.

"Nantinya di dalam RDPU dengan komisi IX DPR, saya minta PPTII untuk mempersiapkan bahan, informasi dan data agar lebih produktif. Sehingga dapat menghasilkan kesepakatan dan regulasi yang dihasilkan menjadi lebih tepat, terlebih lagi agar tenaga kesehatan tradisional bisa terakomodir, terserap dan aspirasi dapat tertampung dengan baik," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, saat menerima audiensi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Dasco juga meminta agar komisi terkait, yaitu Komisi II DPR RI untuk segera menindaklanjuti persoalan. Yaitu, soal belum optimalnya pengelolaan desa untuk pengembangan, pembangunan dan kesejahteraan desa tentunya.

"Kendala - kendala di lapangan tentunya ada, terutama terkait kebijakan yang lebih tinggi itu harus ada petunjuk dari pusat," ujarnya. Dasco menilai para penggiat di desa ini tentulah sangat penting karena langsung menyentuh ke akar rumput, yaitu masyarakat desa. Dalam hal ini DPR RI tentunya mengapresiasi kehadiran ABPEDNAS.

"Nantinya DPR RI setelah reses akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Abpednas dan Abped Daerah untuk bisa menyampaikan bahan aspirasi dan masukannya di Komisi II DPR RI, untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang mengikat dan tentunya untuk pengembangan dan kesejahteraan desa," tutup Dasco. ● rdn/aha







Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel saat berfoto bersama delegasi Ikatan Persatuan Haji Indonesia (IPHI).

# Rachmat Gobel Apresiasi IPHI Luncurkan Terobosan Produk Inovatif Berbahan Singkong 'Mie Haji'

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel

mengapresiasi terobosan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dalam meluncurkan hasil karya inovatif berupa produk 'Mie Haji' berbahan dasar singkong. Gobel mengungkapkan, terobosan tersebut sebagai bukti bahwa IPHI tidak hanya sebatas mengurus umat untuk haji, tetapi

juga mengurus sektor ekonomi khususnya pada sektor pangan.

Demikian disampaikan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini usai menerima audiensi delegasi IPHI yang digelar di Lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7). Turut hadir dalam audiensi Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi serta Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI H. Ismed Hasan Putro beserta jajaran.

"Jadi apa yang dilakukan oleh IPHI di bawah kepemimpinan H. Ismed Hasan Putro dan jajaran merupakan sesuatu terobosan yang luar biasa. Indonesia merupakan potensi pasar yang besar, maka saya yakin produk ini akan menjadi produk yang sangat potensial tidak hanya untuk urusan pangan tapi juga ini akan bisa menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah," ujar Gobel.

Terlebih, tandas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, melalui produk 'Mie Haji' berbahan dasar singkong itu akan sangat mendorong sektor pertanian nasional khususnya petani singkong. Tak hanya itu, produk 'Mie Haji' juga akan meningkatkan sektor pertanian lainnya seperti cabai yang juga merupakan bagian dari bahan 'Mie Haji' tersebut.

"Tentu, sebagai Wakil Ketua DPR RI saya sangat menyambut baik dan sangat mendukung penuh hasil karya inovatif berupa produk 'Mie Haji' ini. Tentu, nantinya DPR juga akan segera membahas terkait dukungan yang diperlukan untuk mendorong industri 'Mie Haji' berbahan dasar singkong ini bisa tumbuh berkembang. Apalagi ini bisa menyerap lapangan kerja yang sangat besar di Indonesia," pungkas Gobel lebih lanjut. ● **pun/aha**

# Yan Permenas Dorong Sinergitas Jaringan Optik Bakti Kominfo dan Telkom

**A**nggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong terbangunnya jalinan sinergitas antara jaringan optik Bakti Kominfo dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat meninjau lokasi proyek strategis nasional Palapa Ring Timur Kominfo di Perkantoran SKPD Kota Baru Petam, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

"Kita harus sinergikan antara jaringan optik Kominfo dengan Telkom dalam rangka membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi sehingga kedepannya nanti tidak mengalami *trouble* lagi, dan benar-benar bisa saling *mem-back up* antara jaringan optik yang dimiliki Telkom dan juga jaringan optik yang dimiliki oleh Bakti Kominfo melalui Palapa Ring Timur," ucap Yan di sela-sela peninjauan di Sarmi, Papua, Selasa (26/7).

Dikatakannya, daerah-daerah yang mudah dijangkau, khususnya daerah pesisir, semua harus bisa terhubung oleh jaringan infrastruktur telekomunikasi, baik perangkat yang dimiliki oleh operator Telkom ataupun juga Bakti Kominfo. Sedangkan daerah-daerah yang sulit untuk dilakukan

yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Bakti Kominfo bisa *mem-back up* jaringan yang ada," urai Yan Permenas.

Ia menambahkan, untuk Prt Radio dapat digunakan bagi daerah-daerah yang belum terjangkau kabel optik. "Tidak ada alasan daerah-daerah pesisir untuk tidak menarik kabel optik. Kominfo mempunyai tanggungjawab besar untuk melakukan pemerataan diwilayah-wilayah 3T, sehingga daerah-daerah



Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meninjau lokasi proyek strategis nasional Palapa Ring Timur Kominfo di Perkantoran SKPD Kota Baru Petam, Kabupaten Sarmi, Papua.

penarikan kabel optik Sementara *di-cover* dengan Prt radio.

"Tingkat kestabilan penggunaan jaringan komunikasi internet, dominan lebih stabil dengan kabel optik. Oleh karenanya pasti tidak akan ada masalah lagi bila saling *back up* antara Bakti dengan Telkom. Di Sarmi ini beberapa kali mengalami gangguan yang diakibatkan putusya jaringan kabel bawah laut. Di Jayapura dan di Sarmi akan kita dorong agar semua optiknya terkoneksi dengan Palapa Ring. Telkom juga bisa bekerjasama dengan Bakti Kominfo agar apabila kembali terjadi *trouble* akibat putusya jaringan kabel laut seperti

kepulauan harus dibangun kabel optik," tandasnya.

Yan Permenas juga menyatakan, pemerintah harus mendukung pembangunan infrastruktur yang terbaik untuk jangka panjang agar masyarakat dapat menerima manfaat yang besar. "Kita dorong percepatan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah 3T itu dalam rangka menghemat biaya dan melakukan efisiensi. Sehingga kita minta agar Bakti juga bisa masuk agar bisa ikut menjamin keberlangsungan jaringan telekomunikasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan," ungkap politisi Partai Gerindra itu. ● **dep/aha**

FOTO: DEV/NVL

Scan QR untuk berita selengkapanya





# Guspardi Gaus Nilai Kampanye di Kampus Perlu Diatur

**A**nggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai wacana kampanye di kampus perlu diatur dengan ketentuan dan mekanisme yang komprehensif. Hal itu untuk memberikan kesetaraan, ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Sehingga tidak menimbulkan konflik ke depan.

"Wacana kampanye di kampus bisa menjadi media edukasi dan ajang adu gagasan dalam menyampaikan visi dan misi di hadapan civitas akademika. Para kontestan dapat diuji kemampuan intelektualitasnya. Sebab, warga kampus termasuk kelompok kritis sehingga bisa menguji kualitas ataupun program yang dijanjikan para calon," papar Guspardi dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Selasa (26/7).

Sehingga diharapkan dapat menciptakan kampanye yang lebih berkualitas karena masuk di kalangan akademisi. Dengan kata lain, kampus bisa menjadi wahana baik untuk menguji kapasitas seorang calon legislatif. Selain itu, katanya, edukasi politik bisa dilakukan secara berkesinambungan termasuk di kampus. Sehingga memantik kesadaran generasi

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

muda untuk meleak politik dan mendorong partisipasi langsung dalam konteks demokrasi.

Meski demikian, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pelaksanaan kampanye di kampus harus bebas intervensi. Terutama pihak kampus dan pemerintah jangan sampai melakukan intervensi. "Pasalnya, rektor itu kan diangkat oleh menteri, sementara menteri adalah pembantu presiden. Nanti presiden melakukan intervensi. Akibatnya, hanya partai tertentu yang bisa berkampanye di kampus. Hal itu tentu menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu lain," ungkap legislator dapil Sumbar II itu.

Dengan kata lain, wacana kampanye di kampus jangan sampai menimbulkan dinamika dan memicu konflik antara kampus dengan partai, atau sesama partai.

Apalagi menimbulkan keruwetan. Dikutip dari berbagai media, sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa kegiatan kampanye di kampus diperbolehkan dengan sejumlah catatan.

Sementara, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, bukan kampanye. "Dilarang itu apa? Fasilitasnya, bukan kampanyenya. Mari kita perhatikan bersama-sama, pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dilarang itu apa, menggunakan fasilitas, bukan kampanyenya. *Clear ya*," kata Hasyim kepada awak media beberapa waktu lalu. • **ayu/aha**



FOTO: GERALD/NVL

Scan QR untuk berita selengkapya



# Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika



FOTO: JAKA/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB.

**K**etua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengapresiasi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menjaga keamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pihaknya menilai, strategi Polda NTB dalam rangka pengamanan *event* internasional dengan melibatkan semua pihak ini sangat bagus.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunker Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, NTB, baru-baru ini. Menurut Bambang, Kapolda NTB memiliki kapasitas yang top dan berkelas dalam menjaga keamanan gelaran kelas internasional ini. "Pak Kapolda kita kasih jempol, karena ketika menangani event internasional tidak ada satupun cacat, kalau pun

ada itu hanya sedikit. Saya berharap, ke depan masih akan banyak *event* internasional yang diakan di sini, semoga pengalaman dalam menjaga gelaran MotoGP kemarin bisa menjadi pembelajaran agar selalu menjadi lebih baik," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, legislator dapil Jawa Tengah IV ini juga menyoroti terkait sejumlah kasus yang ada di NTB, seperti pelecehan seksual, sengketa tanah dan narkoba. Bagian lain yang mendapat catatan Komisi III DPR adalah soal putusan eksekusi perkara perdata yang sudah diputus di pengadilan, tetapi tidak bisa dieksekusi di lapangan.

"Ini ada ratusan kasus eksekusi perdata yang belum diproses karena alasan biaya pengamanan yang mahal. Nanti coba kita akan hadirkan aturan ini juga di RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Hasil dari kunjungan ini

akan kita bawa di rapat internal komisi dan dirumuskan apa saja yang harus ditindaklanjuti," jelas Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, ke depan para penegak hukum di NTB ini harus ada sinergitas yang lebih baik lagi, misalnya Direktorat Narkoba Polda NTB dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB dalam pemberantasan narkotika.

"Selain itu, menurut saya juga terkait penerapan *restorative justice* antara jajaran Polri sebagai penyidik dan penyelidik, Kejaksaan sebagai penuntut agar memiliki suatu kesepahaman yang sama dalam menangani suatu kasus. Untuk itu, saya mendorong ego sektoral dari masing-masing lembaga agar bersinergis sebagai sesama penegak hukum," terang politisi PPP tersebut lebih lanjut. ● **jka/aha**



# Komisi IV Dukung Penguatan Infrastruktur Bagi Nelayan Donggala

**A**nggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyebutkan potensi sektor

perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah, sangat besar. Untuk itu perlu dukungan

penguatan infrastruktur yang memadai guna memudahkan para nelayan untuk mengembangkan hasil perikanan.

"Sangat luar biasa ikan-ikan yang dihasilkan, dari mulai Cakalang, Tuna, dan lain-lain. Ini membutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan dalam rangka memudahkan nelayan untuk

melakukan penangkapan ikan," papar Syafrudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR ke PPI Donggala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah, di Donggala, Kamis (14/7).

Syafrudin juga mendapati, bahwa para nelayan di PPI Donggala mengalami keterbatasan infrastruktur yang harus segera direspon oleh pemerintah pusat. "Ada beberapa, misalnya jembatan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian, sehingga siklus perekonomian bisa berjalan," kata Syafrudin.

Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI itu memaparkan, apabila penghasilan dan produksi dari nelayan sudah baik, tetapi tidak didukung dengan pelayanan operasional yang baik, tentunya perekonomian nelayan tidak akan berjalan secara optimal.

Syafrudin menegaskan, agar pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya untuk memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, namun juga fokus terkait penjualan ikan hasil tangkap di pasaran agar mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merugikan nelayan. "Harapan kami agar seluruh kegiatan nelayan di Indonesia, khususnya yang ada di PPI Donggala ini dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Syafrudin meminta pemerintah dapat memprioritaskan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada nelayan yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah. "Pemerintah harus memberikan dukungan operasional yang maksimal. Selain itu, kami juga minta pemerintah agar dapat memberikan solusi agar ikan-ikan yang ditangkap dapat dijual dengan harga standar, bahkan lebih dari itu. Kalau hal ini dapat berjalan dengan baik, maka perekonomian nelayan juga dapat terdongrak dengan baik," ucap legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu. • [ica/aha](https://www.ica/aha)



FOTO: ICA/AHA

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin.

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Kecelakaan Maut Odong-odong Harus Jadi Bahan Evaluasi

**K**etua Komisi V DPR RI Lasarus berduka atas meninggalnya sembilan warga akibat kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta saat menyeberang di perlintasan sebidang ilegal di Serang, Banten. Ia mendorong agar peristiwa tersebut dapat menjadi bahan evaluasi.

"Atas nama Komisi V DPR RI, saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan yang terjadi dan tentunya duka cita mendalam

”

**UNTUK MENUTUP SELURUH PERLINTASAN SEBIDANG, KHUSUSNYA PERLINTASAN ILEGAL MAUPUN YANG TIDAK MEMILIKI PALANG PINTU. HAL INI PENTING UNTUK MENCEGAH TERJADINYA LAGI KECELAKAAN LALU LINTAS.**

terhadap seluruh korban yang berpulang akibat peristiwa tersebut," ungkap Lasarus, dalam rilis kepada **Parlementaria**, Kamis (28/7).

Atas kecelakaan tersebut, Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi mengingatkan Pemerintah untuk menjadikan kecelakaan maut odong-odong di Serang itu sebagai bahan evaluasi. Menurut Lasarus, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib menggalakkan sosialisasi serta edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.

"Ini masalah klasik di perlintasan sebidang kereta api. Masalah seperti ini akan terus berulang mana kala kesadaran pengguna jalan yang kurang terhadap bahaya yang mengintai di perlintasan sebidang atau pengamanan pintu perlintasan sebidang yang lemah," tuturnya.

Kecelakaan maut odong-odong versus kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa (26/7). Selain korban meninggal, terdapat pula 24 penumpang odong-odong yang mengalami luka berat dan ringan.

Politisi PDI-Perjuangan itu meminta Pemerintah melalui instansi terkait untuk menutup seluruh perlintasan sebidang, khususnya perlintasan ilegal maupun yang tidak memiliki palang pintu. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya lagi kecelakaan lalu lintas.

"Yang paling aman memang tidak ada lagi perlintasan sebidang. Semestinya kecelakaan bisa dicegah jika perlintasan sebidang ilegal tegas ditutup, dan atau semua dalam penjaagaan petugas perkeretaapian,"

ujar Lasarus. ●

**eko/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



FOTO: ARIEF/NVL

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.



# Nusron Wahid Nilai Tidak Perlu Ada Relaksasi Kebijakan DMO

**A**nggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengatakan tidak setuju dengan langkah Kementerian Perdagangan untuk merelaksasi kebijakan kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO), *Domestic Price Obligation* (DPO), *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya. Apalagi kebijakan tersebut selama ini dinilai mampu menekan harga minyak goreng di dalam negeri meski harga CPO dunia sedang tinggi.

"Kalau DMO dan DPO dihapus, kemudian harga melambung tinggi kayak kemarin, apakah pengusaha kemudian tanggung jawab?" kata Nusron kepada awak media, Senin (25/7). Oleh karena itu, Nusron menilai pencabutan kebijakan DMO dan DPO justru akan memicu kembali kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

"Jangan-jangan malah memanfaatkan momentum untuk mengambil keuntungan sesaat yang ujung-ujungnya korbannya konsumen yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia," imbuh politisi Partai Golkar itu.

Menurut Nusron, aturan yang dibuat pemerintah lewat kebijakan DMO dan DPO sudah jelas dan transparan, sehingga tidak perlu dilakukan relaksasi terhadap kebijakan tersebut. Legislator dapil Jawa Tengah II ini menambahkan, justru yang perlu dilakukan para



Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid.

FOTO: OJI/NVL

”

**KALAU DMO DAN DPO  
DIHAPUS KEMUDIAN  
HARGA MELAMBUNG  
TINGGI KAYAK KEMARIN,  
APAKAH PENGUSAHA  
KEMUDIAN TANGGUNG  
JAWAB?”**

pemangku kepentingan adalah fokus terhadap infrastruktur distribusi yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

"Ini yang harus ada percepatan dan akselerasi. Pemerintah harus gerak cepat memberikan bimtek (bimbingan teknis) buat pedagang minyak goreng agar bisa mengakses kanak aplikasi Si Mirah (Sistem

Informasi Minyak Goreng Curah)," imbuh Nusron.

Oleh karena itu, Nusron pun menyesalkan adanya kalangan pengusaha yang justru meminta kebijakan DMO-DPO dihapuskan. Padahal menurutnya, aturan main yang sekarang ditetapkan pemerintah terkait DMO-DPO sudah cukup jelas dan transparan.

"Kalau ada pengusaha yang mengatakan DMO-DPO ribet, berarti pengusaha yang egois, memikirkan diri sendiri, hanya mengejar keuntungan sesaat. Tidak berpikir jangka panjang tentang nasib mayoritas rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kalau punya komitmen kasih barang ke dalam negeri 1 kilo dapat fasilitas ekspor 5-6 kilo. Yang *enggak* mau, itu berarti yang malas dan nakal," tegasnya. • **bia/aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Mulyanto Ingatkan Pemerintah Berhati-Hati Cabut Kebijakan DMO dan DPO



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

**A**nggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengimbau pengusaha untuk menyisihkan produksi CPO, karena hal tersebut dinilai terbukti tidak efektif dan malah membuat harga minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal tersebut dikatakannya saat menanggapi pernyataan Menteri

”

**PENDEKATAN PEMERINTAH SEMESTINYA LEBIH BERSIFAT STRUKTURAL BERBASIS REGULASI.**

Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut rencana penghapusan kewajiban DMO- DPO (*Domestic Price Obligation*) CPO untuk bahan baku minyak goreng domestik. “Pendekatan negara tidak cukup sekadar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau

semacam *gentlemen agreement* terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri,” kata Mulyanto kepada awak media, Rabu (27/7).

Mulyanto menilai, imbauan kepada pengusaha selama ini adalah pendekatan kultural dalam masyarakat. Namun, pendekatan pemerintah semestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi. “Negara memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, karenanya pendekatan negara terutama bersifat *binding* (mengikat) dan *compulsory* (memaksa) bukan sekadar *voluntary* (sukarela),” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III mengingatkan, sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah mendesak partisipasi produsen sawit untuk ikut dalam program subsidi minyak goreng curah berbasis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, imbauan tersebut tidak efektif.

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dengan rencana menghapus kebijakan DMO- DPO minyak sawit mentah dan menyerahkan ketersediaannya pada kesukarelaan komitmen produsen. Ia pun mewanti-wanti, jangan sampai kebijakan tersebut justru menyebabkan lonjakan harga minyak goreng dan memicu inflasi, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha minyak goreng ketimbang masyarakat.

“Pemerintah tidak cukup bekerja berbasis ‘imbauan’ tetapi harus ‘hadir’ mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya. Jangan sampai komoditas ini langka atau harganya tidak terjangkau masyarakat seperti sebelum-sebelumnya,” tegas Anggota Baleg DPR RI itu. • **bia/aha**





# UU TPKS Disahkan, Selly Andriany: Laporan Kasus Kekerasan Seksual Meningkat

**S**ejak Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah, laporan mengenai kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, hal itu menunjukkan tingkat kesadaran dan empati masyarakat untuk melapor semakin baik, karena sudah adanya payung hukum yang menjamin perlindungan hingga pemulihan korban.

"Menurut saya ini adalah suatu kehebatan UU TPKS. Diundangkannya UU TPS menuntun masyarakat berani *speak up* karena merasa ada payung hukum yang melindungi. Dulu mereka tidak berani berbicara karena merasa percuma menyampaikan ke negara karena tidak ada perlindungan atau pemberian hukuman kepada predator seksual," kata Selly dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema "Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS?" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Tingginya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual, menurut Selly, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual. "Tingginya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan seksual, perlu didukung dengan peningkatan anggaran, salah satunya untuk

memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai seksual sedini mungkin," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Pasalnya, lanjut Selly, berdasarkan data diketahui pemerintah daerah mempunyai keterbatasan anggaran, dari 514 kabupaten/kota hanya 246 daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang perlindungan anak dan perempuan. "Belum lagi, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) yang memang memiliki anggaran yang kecil, namun memang fungsinya adalah untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga lain. Kami minta hal ini juga

dioptimalkan," pinta legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.

Pasalnya untuk mewujudkan visi misi Presiden Jokowi yang mau melahirkan generasi unggul, menurut Selly anak-anak harus mendapatkan perlindungan kesejahteraan, kesehatan dan mendapatkan hak-hak dalam bentuk informasi serta kehidupan layak. "Kalau kita berbicara generasi unggul atau revolusi mental sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi, maka penting bagi mereka (anak-anak) mendapatkan perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dalam bentuk informasi, kehidupan yang layak, kesehatan hingga kesejahteraan," katanya. ●  
**rnm/sf**



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina.

FOTO: MUNICHEN/NVL

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Cacar Monyet Mengintai, Pemerintah Harus Siapkan Strategi Pencegahan

**A**nggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta pemerintah agar segera merumuskan langkah antisipatif mencegah masuknya cacar monyet ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan langkah guna mengantisipasi penularan penyakit cacar monyet.

"Berikan edukasi kepada masyarakat tentang medium penularan, cara pencegahan, dan faktor yang bisa memicu terjangkitnya penyakit cacar monyet. Langkah preventif harus lebih diutamakan mengingat masih minimnya sosialisasi mengenai penyakit ini," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (26/7).

Studi yang diterbitkan oleh *New England Journal of Medicine* memaparkan jika cacar monyet dapat ditularkan melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Menurutnya Indonesia harus

belajar untuk tidak bersikap meremehkan di awal pandemi menjangkiti dunia.

"Kita harus belajar dari pandemi Covid-19, di mana Indonesia sebagai negara yang belum terjangkit saat itu, bersikap seolah meremehkan sehingga terlambat melakukan antisipasi. Kita panik dan baru bertindak setelah ditemukan satu kasus yang kemudian merebak dengan sangat cepat. Kita lengah dan terlambat lakukan antisipasi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ia berharap jangan sampai

mengulangi kesalahan yang sama. "Lakukan persiapan pencegahan semaksimal mungkin," katanya. Netty juga meminta pemerintah agar lebih waspada karena penyakit cacar monyet muncul seiring naiknya kasus Covid-19 di tanah air.

"Saat ini kasus Covid-19 sedang naik kembali. Ada 40 ribu kasus aktif di Indonesia. Pemerintah harus memastikan upaya percepatan vaksinasi 1, 2 dan *booster* berjalan dengan baik. Sementara realisasi vaksin *booster* kita masih berkisar 25 persen dari target sasaran. Sementara di masyarakat mulai terbangun sikap resistensi terhadap *booster* karena menganggap pandemi sudah selesai," papar Netty.

Terakhir, Netty meminta pemerintah agar terus memantau dan melakukan penelitian terhadap penyakit cacar monyet, termasuk menemukan vaksin dan obatnya. "Jangan sampai kita ketinggalan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi penyakit

tersebut. Indonesia sebagai Presidensi G20 harus menjadi yang terdepan dalam melawan potensi-potensi wabah global seperti cacar monyet," tandas Netty.

• ann/aha

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher.

FOTO: MENTARI/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Mujib Rohmat: Komisi X Terkesan Minat Baca Masyarakat Kendal Tinggi



FOTO: OJI/ANL

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI berfoto bersama usai meninjau Gedung Perpustakaan Daerah Kendal, Jawa Tengah.

**A**nggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengaku kagum dengan minat baca masyarakat Kendal yang masih tinggi, di tengah serbuan era media sosial saat ini. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kendal, di Karangsari, Kendal, Jawa Tengah, Jumat (15/7), yang dibangun di atas lahan seluas 4.606 meter persegi dengan biaya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2021 menjadi perpustakaan yang dibangun secara modern.

"Saya sangat terkesan dengan minat baca masyarakat Kabupaten Kendal yang cukup tinggi. Kini tinggal bagaimana kita memberikan semangat dan fasilitas misalnya dengan menyediakan bukan hanya tempat tapi juga bahan bacaan, tidak hanya berupa fisik tapi berupa digital. Jadi Perpustakaan Nasional juga mitra kami, oleh karena itu kita

akan terus melakukan peninjauan Perpusda-Perpusda yang ada di daerah untuk memastikan daya minat baca masyarakat bisa terus meningkat dan bisa menunjang pendidikan di daerah itu sendiri," papar Mujib lebih lanjut.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, selain meninjau Perpusda, kunjungan Komisi X DPR RI itu juga melihat perkembangan pendidikan di Kendal dan untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan di Kendal yang belum terselesaikan. "Dengan demikian, setelah ini kami berharap semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan bisa terpecahkan seperti persoalan kebudayaan dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya," ujarnya.

Legislator dapil Jawa Tengah I ini mengatakan bahwa selain bermitra dengan Kemendikbud, Komisi X DPR RI juga bermitra dengan Kemenpora, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi keempat lembaga

itu tidak bisa terpisahkan dengan kinerja Komisi X DPR RI. "Kami sangat mengapresiasi kepada Pemkab Kendal dalam pengembangan literasi. Jadi kerja sama pemerintah pusat dan daerah ini sangat terasa sekali di sini," tambahnya.

Di lain pihak, salah seorang penggiat Perpustakaan Indonesia dan penggiat literasi di Kendal, Munawar mengatakan, saat ini, literasi atau daya minat baca masyarakat di Kendal terus meningkat. "Literasi minat baca masyarakat harus terus dikembangkan dan harus bisa diaplikasikan di desa-desa. Perpustakaan ini harus terus dikembangkan dan diperjuangkan, karena saat ini sudah di era digital, maka kita harus bisa bagaimana minat baca masyarakat bisa terus meningkat, karena buku itu sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan," pungkas Munawar. ● **oji/aha**

# Sodik Mujahid Apresiasi Pelaksanaan PPDB di Salatiga

**A**nggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid mengapresiasi proses seleksi siswa baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah kepala sekolah di Salatiga, bahwa PPDB dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu melalui jatah zonasi dan afiliasi.

"PPDB dijalin sesuai dengan prosedurnya tentang jatah zonasi tentang afiliasi tentang bantuan-bantuan yang lain itu dijalankan dengan yang baik di sekolah ini," kata Sodik usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau SDN 06, SMPN 02, SMAN 03 di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7).

Sodik juga mengapresiasi proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan pola ekstrakurikuler dan menggunakan metode atau pola partisipatif. "Pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sini dilakukan dengan pola ekstrakurikuler. Tadi didemonstrasikan, bagaimana para siswa menampilkan pendidikan dengan pola ekstrakurikuler,

dengan cara yang bagus. Jadi polanya adalah partisipatif, tidak dipimpin oleh guru bahkan dipimpin oleh seorang siswa," ujarnya.

Selanjutnya, Sodik juga mengapresiasi kelengkapan perpustakaan Salatiga, dimana buku-buku yang dikirim dari pusat sudah masuk. Dan menurutnya, hal yang menjadi catatan adalah

terkait dengan penyempurnaan konten dari buku-buku tersebut. Politisi Partai Gerindra itu juga sempat menanyakan, soal digitalisasi perpustakaan, dimana seluruh sekolah yang didatangi sudah mengimplementasikan perpustakaan digital atau e-Library.

"Itu situasi umum yang kami dapatkan di sekolah. Tapi ada yang menarik, yaitu ketika saya tanya kenapa senang (sekolah) tatap muka atau bertemu, jawaban mereka karena senang bertemu dengan teman. Ini adalah catatan bagaimana agar guru juga bisa tampil menarik ya, dan disukai oleh anak-anak tersebut," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I itu sembari mengapresiasi penerapan prokes di SMPN 02 yang mencapai 95 persen, dan 80 persen bagi SDN 06 dan SMAN 03 Kota Salatiga. • ndy/sf

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid.



FOTO: NADYA/NVL

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





# Nuroji Nilai Banyak Wisata Penunjang di Demak yang Belum Terpublikasi Dengan Baik

**A**nggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai banyak potensi wisata penunjang di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang belum ter-*explore* dan terpublikasikan dengan baik. Ia menilai daerah tersebut memiliki potensi wisata yang masih bisa dimaksimalkan.

"Saya melihat di Kabupaten Demak ini banyak potensi wisatanya. Tapi belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik," ujar Nuroji saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7).

Politisi Partai Gerindra itu mengakui, bahwa selama ini publik lebih melihat Kabupaten Demak sebagai destinasi wisata religinya. Pertama, karena keberadaan makam Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari sembilan wali penyebar agama Islam. Kedua, Masjid Agung Demak yang cukup tua dan bersejarah.

Namun, ternyata masih banyak potensi wisata penunjang di Demak yang belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik. Sebagaimana yang dipaparkan Bupati Demak Eisti'anah bahwa Kabupaten Demak memiliki sebuah pantai yang cukup unik, selain berpasir, juga ada hutan mangrove yang bisa disusuri dengan menggunakan perahu.

Pantai Istambul namanya, ini merupakan singkatan dari Istana Tambakbulusan, sebuah nama



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Bupati Demak.

desa dimana lokasi pantai ini berada, yang tepatnya berada di Kecamatan Karangtengah. Belum lagi wisata budayanya dengan upacara adat grebek, dan wisata kuliner ikan asap kepala manyung, minuman khas Demak Coro serta berbagai makanan ringan khas Demak.

"Ini menjadi sebuah potensi wisata yang cukup besar, wisata penunjang yang juga harus dipromosikan dengan baik. Salah satunya dengan cara yang cukup murah, lewat media sosial, Instagram, Facebook dan TikTok yang kini sedang tren. Kemudian viralkan lewat medsos tersebut. Untuk kreatifitas serahkan ke anak

muda, pasti mereka bisa," paparnya.

Anggota DPR yang juga budayawan Betawi ini meyakini dengan semua terpublikasi dan diviralkan dengan baik, maka para wisatawan Religi yang tadinya mengunjungi Demak hanya untuk berziarah ke Makam Sunan Kalijaga, maka akan berlama-lama berada di tempat tersebut. Karena adanya wisata penunjang, plus berbagai kuliner khas Demak. "Yang pada akhirnya akan ada menambah penghasilan, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dan tentunya berujung meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut," pungkas Nuroji. • **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi XI: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan, Ekonomi Bali Tumbuh Positif



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Badung, Bali.

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menegaskan bahwa berdasarkan data-data dari sektor keuangan, pemulihan ekonomi di Provinsi Bali sedang terjadi pertumbuhan positif. Walaupun ekonomi Provinsi Bali mengalami kontraksi pada triwulan I tahun 2022, namun trennya naik (positif).

Pertumbuhan positif terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi selama triwulan I tahun 2022 yang dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit melalui lembaga perantara keuangan dan mulai banyaknya kunjungan wisman ke

”

**BANYAK HAL DUKUNGAN PARIWISATA INI DATANG DARI DUNIA UMKM, JADI KALAU SOAL SINERGITAS ITU PASTI**

Pulau Dewata juga meningkatkan aktivitas usaha *money changer*.

”Dari sisi kebijakan fiskal melalui program-program pemerintah pusat sudah banyak di-*gelontorkan* dan kita melihat dari angka-angka pertumbuhan mulai membaik di Provinsi Bali,” ungkap Dolfie usia memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR

RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, OJK, Himbara, Askrindo, Jamkrindo, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemkab Bangli, dan Pemkab Tabanan, di Bali, Senin (25/7).

Lebih lanjut, Dolfie menyampaikan bahwa walaupun sektor pariwisata menjadi tumpuan perekonomian di Provinsi Bali, sektor pertanian dan sektor UMKM juga salah satu penopang perekonomian di Bali. “Kalau kita lihat pariwisata di Bali ini pasti didukung oleh sektor pertanian, karena di dalam pariwisata ada kuliner, di dalam pariwisata juga ada dukungan UMKM,” sebutnya.

”Banyak hal dukungan pariwisata ini datang dari dunia UMKM, jadi kalau soal sinergitas itu pasti. Tinggal sekarang belajar dari pandemi Covid-19 ini, bagaimana Bali tidak melulu didukung satu sektor utama sehingga apabila kena pandemi semua sektor jadi lumpuh,” imbuhs politisi PDI-Perjuangan itu lagi.

Menurut Dolfie, dengan adanya pandemi ini telah terjadi transformasi di masyarakat yang tadinya semuanya pariwisata sekarang banyak yang beralih ke sektor pertanian dan ini peningkatannya cukup signifikan. “Ini kan sesuatu yang positif dalam rangka memperkuat sektor pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali agar tidak hanya pada satu sektor tetapi juga sektor pertanian,” ujar Dolfie.

Berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada Mei 2022, total perekonomian Bali pada triwulan I tahun 2022 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp55,24 triliun sedangkan apabila diukur atas dasar harga konstan, maka PDRB Bali tercatat sebesar Rp35,33 triliun. ● **skr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapny





# Peningkatan Mobilitas Masyarakat **Dukung** Pertumbuhan Ekonomi Bali

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2021 yang tercatat 2,07 persen (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga di sebagian besar kelompok barang. Meskipun demikian, realisasi inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi Nasional yang sebesar 2,64 persen (yoy).

"Secara umum, kondisi stabilitas sistem keuangan di Bali pada

**M**omentum perbaikan ekonomi Bali berlanjut pada triwulan I 2022, dengan pertumbuhan sebesar 1,46 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya, sebesar 0,51 persen (yoy). Perbaikan sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta relaksasi persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari saat membuka pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), Jamkrindo, Askrindo, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Jembrana dan Buleleng, di Nusa Dua, Bali, Senin (25/7).

"Kembali dibukanya *international direct flight* dan peningkatan kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, and*



Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja terkait di Nusa Dua, Bali.

*Exhibition (MICE)* juga berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, lanjut Hatari, membaiknya pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari kinerja konsumsi rumah tangga (RT) dan ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi Bali terutama didorong oleh perbaikan kinerja industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi," jelas politisi Partai NasDem itu lebih lanjut.

Hatari menambahkan, realisasi inflasi Bali pada triwulan I tahun 2022 tercatat sebesar 2,41 persen

triwulan I 2022 tetap terjaga di tengah momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit tercatat menunjukkan peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali. Kualitas kredit yang disalurkan perbankan terjaga pada level di bawah ambang batas 5 persen. Di sisi lain, kinerja kredit UMKM juga menunjukkan peningkatan dan turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan," pungkas legislator dapil Maluku Utara tersebut. ● **sf**

FOTO: SOFYAN/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Perlu Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Angkat Perekonomian Denpasar, Klungkung dan Karangasem

**A**nggota Komisi XI DPR RI Ella Siti Nuryamah mendukung kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya mengangkat pertumbuhan sektor perekonomian di Provinsi Bali. Khususnya Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem yang menjadi prioritas Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (25/7).

Hal itu ia sampaikan usai mendengarkan pemaparan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten terkait sejumlah isu strategis dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ketiga daerah tersebut. Di antaranya pembangunan ekonomi pariwisata, pertanian, industri kreatif dan UMKM bagi peningkatan perekonomian

wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Terkait hal itu, Ella secara spesifik meminta Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap berbagai program yang akan dilakukan. "Tolong Bappenas dengan kemenkeu menjadi perhatian untuk tiga kabupaten ini, di titik-titik mana yang memang programnya harus segera diturunkan," ujarnya.

Ella menilai, meskipun Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah memberikan kemampuan kepada pemda untuk melakukan penguatan infrastruktur di daerah dalam rangka melakukan pemulihan dan keberlanjutan ekonomi nasional, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, kolaborasi antara keduanya tetap diperlukan.

"Meskipun memang UU HKPD juga memberikan pengayaan terkait dengan pembiayaan, ya baik itu pinjaman dan lain sebagainya tetapi ini perlu kolaborasi antara pusat dengan pemda pemda yang ada di Provinsi Bali," pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menutup pernyataannya. ● **rr/aha**



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Denpasar, Bali.

FOTO: RIZKI/AN/L

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Willy Aditya Apresiasi Media Atas Pemberitaan Masif RUU TPKS

**W**akil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memberi apresiasi kepada

media atas pemberitaan yang menggebu dan beramal ramai, sehingga Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) begitu cepat disahkan dan diundangkan menjadi UU TPKS pada Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu yang lalu.

"Tugas teman-teman wartawan sudah cukup dan luar biasa. Tapi ada tugas yang lain, yakni membangun narasi tentang kekerasan anak dan kekerasan seksual anak," papar Willy Aditya dalam diskusi forum legislasi 'Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS' di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7). Turut hadir sebagai narasumber, yakni Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina (PDI-Perjuangan) dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar.

Willy Aditya menjelaskan, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS sudah bisa digunakan oleh aparat penegak hukum. Bahkan, jika aturan turunan dari UU tersebut belum dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah. "Ketika UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu disahkan, baik delik dan hukum acara pidananya sudah



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.

FOTO: MUNCHEN/NVL

bisa langsung dieksekusi tanpa peraturan turunan. Baik peraturan pemerintah atau pun perpresnya, UU TPKS sudah bisa digunakan," terang politisi Partai NasDem itu yang juga selaku Ketua Panja RUU TPKS tersebut.

UU TPKS, lanjut Willy, memiliki kelebihan dalam segi hukum acara. Sebab, hukum acara UU TPKS dapat digunakan oleh undang-undang sejenis, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. "Hukum acaranya bisa digunakan oleh undang-undang sejenis, UU Penghapusan Kekerasan pada Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sudah

bisa menggunakan hukum acara UU TPKS," ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI tersebut.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa meski UU TPKS telah hadir, hal itu tidak serta merta mengakhiri kasus kekerasan seksual. Pasalnya, masalah tersebut bersifat sosiologis. Sehingga *political will* dari pemerintah menjadi penting kehadirannya melalui upaya membangun literasi pada payung hukum yang sudah ada. Ia pun berharap pemerintah dan media dapat membangun literasi, khususnya pada aturan pencegahan kekerasan seksual. "Jadi teman-teman semua bagaimana membangun literasi sebagai basis di tengah masyarakat, di atas payung hukumnya." pesannya • hal/sf

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Puteri Komarudin Harap Pemuda Mampu Hadirkan Solusi Permasalahan Global



Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin (kanan) saat menghadiri penutupan KTT Pemuda 20.

U pacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda 20 atau Y20 Indonesia Summit 2022 telah berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/7). Saat hadir pada kesempatan tersebut, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin harap pemuda mampu membawa solusi atas berbagai tantangan global.

"Forum ini membuktikan pemuda dunia bisa mengelaborasi solusi yang inovatif dalam menjawab persoalan, tantangan, dan dinamika global. Karenanya, saya selaku anak muda juga turut mengapresiasi

rekomendasi berupa Komunike yang dirumuskan para delegasi. Kami yakin rekomendasi ini mampu menjawab keresahan yang dirasakan pemuda di negara anggota G20 dan dunia," ucap Puteri.

Sebagai informasi, Y20 Indonesia Summit 2022 merupakan salah satu bagian dari pertemuan engagement groups KTT G20 yang dipimpin Indonesia. Forum ini menjadi ruang bagi delegasi pemuda dari negara anggota G20 untuk berdiskusi dan bertukar pandangan hingga mencapai kesepakatan bersama dalam Komunike. Tahun ini, terdapat 4 empat fokus prioritas yang dibahas dalam forum tersebut yaitu Ketenagakerjaan Pemuda,

Transformasi Digital, Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni, serta Keberagaman dan Inklusi.

Puteri yang juga Ketua Delegasi Indonesia pada Y20 Summit 2021, mendukung implementasi dari Komunike yang dihasilkan sesuai tugas dan fungsi DPR RI. "Karena kita harus memastikan Komunike ini terus hidup dan mampu membawa perubahan yang berdampak positif bagi generasi muda di masa depan. Makanya, Kami di DPR pastinya siap mengawal rekomendasi tersebut pada setiap kesempatan, ketika bertemu mitra kerja di Komisi XI," kata Anggota Komisi XI DPR RI yang juga politisi Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang juga dipercaya untuk memimpin Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, mendorong delegasi untuk memikirkan dan memadukan gagasan yang didiskusikan dalam forum Y20 menjadi kolaborasi yang bermakna dan berdampak sejalan dengan tema Presidensi G20 yang diemban Indonesia.

"Saya menyambut baik komunike Y20 pada empat bidang yang menjadi fokus prioritas. Dimana, isu ini berdampak secara signifikan pada kaum muda di seluruh dunia. Kami sangat bangga dengan terobosan dan proses yang dilakukan untuk menghasilkan Komunike ini. Karena ini menjadi bukti keterampilan resolusi pemuda sebagai pembawa pesan pemuda saat ini. Yang saya yakini suatu saat akan menjadi pemimpin di masa depan," urai Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yaitu, Menpora Zainuddin Amali, Director of Youth Sports Affair Pankaj Kunmar Singh, Director Indian Culture Centre Embassy Of India Kusuma Bansal, Co-Chair Y20 Indonesia 2022, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, serta para delegasi Y20 Indonesia Summit 2022. ● **sf**





Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

Foto bersama Sekretaris Jenderal DPR RI dan Deputi Persidangan DPR RI bersama dengan tujuh pegawai Sekretariat Jenderal yang pensiun.

# Sekjen DPR Lepas Tujuh Pegawai Setjen DPR Purnabakti

**T**ujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memasuki masa pensiun yang selama ini telah mengabdikan hingga memasuki masa purnabakti terhitung 1 Agustus 2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar didampingi Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono dan Plt. Deputi Bidang Persidangan Suprihartini beserta jajaran Setjen DPR RI melepas ketujuh pegawai yang memasuki masa purnabakti tersebut.

Kepada ketujuh pegawai purnabakti, Indra Iskandar menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta loyalitas mereka dalam menjalankan tugas. Ketujuh pegawai Setjen DPR RI yang memasuki masa pensiun itu

yakni Hani Yuliasih (Kepala Bagian Setkom II), Robert Juheng Purba (Perisalah Legislatif Ahli Madya), Rudyanto (Kasubag Tata Usaha Setkom IX), Joko Wahyono (Analisis Keuangan), Sutiya (Pranata Acara), Husin (Pengendali Teknis Keamanan), dan Karyanto (Arsiparis Ahli Muda).

"Tradisi pelepasan ini selalu kita lakukan setiap bulan, tujuannya untuk memberikan penghormatan dan penghargaan bagi mereka yang sudah memberikan dedikasi terbaiknya bagi Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga kita juga melepas mereka dengan terhormat," ucap Indra dalam sambutannya di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Indra juga berpesan agar tujuh pegawai yang memasuki masa

pensiun tetap menjaga silaturahmi meskipun tidak lagi bekerja di lingkungan Setjen DPR RI.

"Memasuki masa purna tugas paling penting adalah menjaga kesehatan, kalau selama ini beban kerja di kantor, manfaatkanlah waktu yang sangat indah ini untuk lebih peduli kepada diri sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan, berkesempatan untuk bisa rutin berolahraga dan bersilaturahmi dengan lingkungannya," pesan Indra.

Selain itu, Indra menambahkan Setjen DPR bekerjasama dengan PT Taspen memiliki program wirausaha pintar berupa permodalan bagi PNS dan pensiunan yang ingin memiliki usaha kecil menengah. Menurutnya, program kewirausahaan tersebut dapat diakses pensiunan pegawai DPR agar tetap produktif di masa purnabaktinya.

"Program untuk pendidikan kewirausahaan itu bisa dikerjasamakan secara kelembagaan tidak perorangan. Saya kira dengan Taspen ini ke depan kami akan terus menjajaki kerja sama sehingga membawa manfaat bagi pensiunan sehingga tetap ada kegiatan yang menghasilkan," terang Indra menutup sambutannya. ● **ann/aha**

## Penghargaan Kepada



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

## Peringkat 3

**Ajang BKN AWARD 2022 di Batam, Kepri**  
**untuk Kategori Perencanaan Kebutuhan**  
**dan Mutasi Kepegawaian pada**  
**Non Kementerian Tipe Besar**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@DPR\_RI



DPR RI